

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan otonomi daerah, pada saat ini penyelenggaraan pemerintah daerah memasuki era baru dengan mengutamakan pendekatan yang desentralistik yang mengacu pada otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dari urusan pemerintahan hingga kepentingan masyarakatnya. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Penggunaan *e-planning* akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, *e-planning* dapat menjaga sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka menengah. *E-planning* diatur dalam Permendagri No. 86/2017. Selain Permendagri No. 86/2017, kewajiban *e-planning* juga tertuang dalam Perendagri No. 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Selain *e-planning*, ada juga *e-budgeting*. *E-budgeting* ialah program komputer untuk mempermudah dalam penyusunan rencana anggaran. Dengan penggunaan program ini, anggaran akan semakin jelas dalam hal transparansi, selain itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas anggaran, dan mempermudah penyusunan laporan keuangan, sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan didorong komitmen organisasi yang baik. Berbagai instansi pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab yang bertujuan untuk

mengawal pembangunan di daerah. Dengan berbagai tugas dan tanggungjawab, penggunaan *e-planning* dan *e-budgeting* akan sangat membantu pemerintah dalam mengawal dan mengontrol pembangunan daerah. Kabupaten Batang menempati peringkat kedua setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari evaluasi KPK menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sudah cukup baik dibandingkan dengan daerah lainnya.

Indikator keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari tingkat akuntabilitas kerjanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, instansi pemerintah wajib membuat laporan penggunaan anggaran dan kerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat atas penggunaan anggaran APBD dan APBN selama periode tertentu. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya laporan penggunaan anggaran merupakan wujud tanggungjawab instansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dalam periode tertentu.

Instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerjanya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sistem akuntabilitas secara teratur yang dapat disebut sebagai akuntabilitas kinerja. Keberhasilan instansi pemerintah dapat dicapai dengan mudah apabila tingkat akuntabilitas kinerja dari instansi tersebut baik. Seluruh instansi pemerintah diharuskan menggunakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitas pemerintahan.

Setiap instansi pemerintah harus memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas dan perannya, jika suatu instansi tidak memiliki komitmen yang baik, maka tujuan dari instansi tersebut tidak akan tercapai. Mathis and Jackson dalam Sopiah (2008) memberikan definisi "*Organizational Commitment is the degree to which employees believe in and accept organizational goals and desire to remain with the organization*". Namun dalam pengimplementasiannya masih banyak instansi yang kurang memperhatikan komitmen dalam instansinya sehingga berdampak pada penurunan akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

Anggaran menjadi sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja karena anggaran dibutuhkan untuk mengelola sumber daya secara maksimal, sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari ketepatan penggunaan anggaran selama periode tertentu yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam melakukan evaluasi anggaran suatu instansi, dapat berupa laporan realisasi anggaran dan kinerja yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut berdasarkan rencana strategik yang sudah ditetapkan. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan dalam mengevaluasi berhasil tidaknya tugas dalam pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan optimal dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena anggaran berperan penting dalam operasional instansi pemerintah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan adanya desentralisasi anggaran, maka di perlukan sistem pengendalian yang berbasis akuntansi. Pengendalian akuntansi digunakan untuk mengukur dan mengontrol berjalannya

instansi pemerintah agar sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengendalian akuntansi berupa sistem pengendalian yang formal berbasis akuntansi yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan instansi dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya secara ekonomis, efektif serta efisien (Mardiasmo, 2009 dalam Pratama, 2019). Pengendalian akuntansi ialah suatu proses memberikan pengaruh kepada orang lain secara efektif dan efisien pada suatu perusahaan agar dapat mencapai tujuan dengan strategi tertentu (Paramitha, 2016). Dengan pengendalian akuntansi, instansi pemerintah dapat mengevaluasi dan mengontrol kegiatan yang berjalan dalam instansi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak instansi pemerintah yang belum menerapkan pengendalian akuntansi dengan baik sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Laporan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran dan hasil kinerja yang dihasilkan dari pengeluaran anggaran tersebut. Dengan diwajibkannya instansi pemerintah untuk menyusun laporan penggunaan anggaran, sistem pelaporan menjadi sangat penting dalam proses penyusunan laporan tersebut. Pelaporan yang jelas, spesifik dan sesuai peraturan akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan yang jelas dan sistematis dapat menjadi pertimbangan instansi pemerintah dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan dapat menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi dalam lingkungan pemerintahan.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperlihatkan hasil yang

berbeda-beda dari satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Penelitian Pebrianti dan Aziza (2018) memperlihatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Fadilah (2018) memperlihatkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Irawati dkk (2019) memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Manullang dkk (2019) memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Fauzan dkk (2017) memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan hasil penelitian Mikoshi (2020) memperlihatkan hasil yang berbeda yaitu kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Pratama dkk (2019) memperlihatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja memperlihatkan hasil yang berbeda-beda dari peneliti yang satu dengan peneliti lain. Hasil penelitian Pebrianti dan Aziza (2018) memperlihatkan bahwa pengendalian akuntansi secara positif mempengaruhi kinerja. Mikoshi (2020) memperlihatkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Pratama dkk (2019) memperlihatkan bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Fauzan (2017) memperlihatkan bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Yulianto (2019) memperlihatkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan hasil penelitian Irawati dkk (2019) memperlihatkan hasil yang berbeda yaitu pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja memperlihatkan hasil yang berbeda-beda dari peneliti satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian Nurji dkk (2019) memperlihatkan bahwa secara simultan maupun parsial sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Cahyani (2015) memperlihatkan bahwa sistem pelaporan terdapat pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Pebrianti (2018) memperlihatkan sistem pelaporan secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Irawati (2019) memperlihatkan hasil sistem pelaporan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Fauzan dkk (2019) memperlihatkan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Pratama dkk (2019) memperlihatkan hasil sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. sedangkan penelitian Mikoshi (2020) memperlihatkan hasil bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Khairunsyah (2018) memperlihatkan hasil sistem pelaporan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafiz (2016) tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating* memperlihatkan hasil kejelasan sasaran anggaran melalui komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*

memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Nurji dkk (2019) memperlihatkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyani (2015) memperlihatkan hasil komitmen organisasi berpengaruh negatif tidak signifikan dan tidak mempunyai pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani (2015) tentang pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating* memperlihatkan hasil komitmen organisasi berpengaruh negatif tidak signifikan dan tidak mampu memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi dengan akuntabilitas kinerja. Arifin (2012) memperlihatkan hasil yang sama yaitu komitmen organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan pengendalian akuntansi dengan akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurji dkk (2019) tentang pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating* memperlihatkan hasil komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antaran sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Arifin (2012) memperlihatkan hasil yang berbeda yaitu sistem pelaporan tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderat.

Objek dalam penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Batang. Kabupaten

Batang alternatif pilihan untuk melakukan penelitian ini karena beberapa alasan. Alasan yang mendasari peneliti memilih SKPD di Kabupaten Batang sebagai objek penelitian adalah : 1) Lokasi SKPD di Kabupaten Batang saling berdekatan sehingga lebih mempersingkat waktu, 2) Kebijakan pemerintah Kabupaten Batang yang mendukung dan mempermudah proses perizinan penelitian, 3) Kabupaten Batang memiliki peringkat tata kelola pemerintahan yang baik dibandingkan kabupaten lain yaitu peringkat ke dua.

Berdasarkan *fenomena gap* dan hasil penelitian yang berbeda-beda dari beberapa penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Pada SKPD di Kabupaten Batang)** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *fenomena gap* dan *gap research* yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Batang ?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Batang ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada

instansi pemerintah di Kabupaten Batang ?

4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating* pada instansi pemerintah di Kabupaten Batang ?
5. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating* pada instansi pemerintah di Kabupaten Batang ?
6. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating* pada instansi pemerintah di Kabupaten Batang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Batang adalah untuk :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kejelasan sasaran anggaran

terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*.

5. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*.
6. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik. Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, komitmen organisasi dan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

- a. Bagi instansi

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemimpin instansi dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*.

b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembang kontribusi dalam pengembangan teori dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk menambah pengetahuan yang belum diperoleh.